

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)
Tahun 2026**

Unit Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim

Program	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Kegiatan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai dengan 12 Mil
Output Kegiatan	Terlaksananya program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut dengan jumlah 70 pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya
Tujuan	Meningkatkan persentase pelaku usaha di bidang perikanan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan menurunkan persentase kasus illegal fishing di wilayah Kalimantan Timur
Analisis Situasi	1. Aktivitas pemanfaatan ruang laut melibatkan laki-laki (operasional penangkapan di laut) dan perempuan (sektor pengolahan dan perdagangan hasil laut) [10]. Namun, fokus pengawasan seringkali lebih dominan pada aktivitas di laut yang mayoritas dilakukan laki-laki, sehingga akses informasi peraturan perundangan bagi pelaku usaha perempuan di pesisir mungkin belum merata. 2. Secara regulatif, pengawasan harus menjamin kedaulatan dan profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya laut sesuai UU 31/2004 dan UU 32/2014. Integrasi perspektif gender diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum mencakup seluruh lapisan masyarakat pesisir tanpa kecuali. 3. Kondisi tahun 2026 menunjukkan data pelaku usaha yang patuh belum terpilah berdasarkan gender secara optimal. Partisipasi kelompok masyarakat (POKMASWAS) yang melibatkan perempuan dalam pengawasan partisipatif juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat sistem pengawasan dini.
Rencana Aksi	1. Melakukan pendataan pelaku usaha (70 pelaku usaha) hasil pengawasan dengan mencantumkan data pilah gender. 2. Melibatkan keterwakilan perempuan dalam kegiatan pembinaan pelaku usaha dan sosialisasi peraturan perikanan . 3. Mendorong peran aktif perempuan dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) sebagai bagian dari pengawasan partisipatif.
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 125.457.520,- (Seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah)
Dampak/ Hasil Output Kegiatan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (laki-laki dan perempuan) terhadap ketentuan hukum yang berlaku

Kepala,



H. Irhan Hukmaidy, S.Pi., MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19751228 200003 1 002

**GENDER ANALYSIS PATHWAY
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026**

Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Issue Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan (Internal)	Sebab Kesenjangan (Eksternal)	Reformasi tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kebijakan: Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan UU 31/2004, UU 45/2009, dan UU 32/2014.	Masyarakat perikanan terdiri dari laki-laki (nelayan tangkap) dan perempuan (pengolah/pedagang). Akses terhadap informasi aturan perizinan masih didominasi laki-laki.	Rendahnya partisipasi dan akses informasi pelaku usaha perempuan terhadap regulasi perikanan dan pengawasan.	1 . Perencanaan pengawasan belum berbasis data pilah gender. 2. Sosialisasi aturan belum menysasar kelompok usaha perempuan secara spesifik.	1. Norma sosial menempatkan urusan hukum/perizinan sebagai ranah laki-laki. 2. Keterbatasan akses informasi bagi perempuan di wilayah terpencil.	Meningkatkan kepatuhan hukum yang setara bagi seluruh pelaku usaha perikanan (laki-laki dan perempuan).	1.Pendataan peserta pembinaan/ pelaku usaha dengan data pilah gender. 2.Sosialisasi aturan yang ramah gender. 3.Penguatan peran perempuan dalam POKMASW AS.	Data jumlah pelaku usaha perempuan yang patuh belum tersedia secara terpilah pada tahun sebelumnya.	Persentas e pelaku usaha perempuan yang diperiksa dan dinyatakan patuh terhadap regulasi.



Kepala,

H. Irhan Hukmaidy, S.Pi., MP.
Pembina Utama Muda

